

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-PressUIN Sunan Kalijaga.
- Amirullah. 2012. Analisis Rasio Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 – 2007. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 9(1): 73-82.
- Andirfa, M. 2018. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah “Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Aceh”*. Lhokseumawe : Unimal Press.
- Andriani, R.N.R., dan Nisa, N.W. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015). *Jurnal Akuntansi*, 13(1): 30-39.
- Arpani, W.N., dan Halmawati. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1): 2373-2390.
- Basri, M.H., dan Riswandi. 2014. Apakah *Flypaper Effect* terjadi di Aceh? Studi Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah. *QE Journal*, 3(4): 199-216.
- CNN Indonesia. 2021. *Belum Mandiri, 88 Persen Pemda Bergantung pada Transfer Pusat*, (Online), (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210625113112-532-659300/belum-mandiri-88-persen-pemda-bergantung-pada-transfer-pusat>, diakses 21 September 2022).
- Fintari, S. 2020. Pengaruh *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1): 59-68.
- Fiorentina, A. 2021. *Pengaruh Flypaper Effect dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019)*. Skripsi. Tasikmalaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2020. *25 Grand Theory (Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis)*. Semarang : Yoga Pratama.
- Grave, A.D., Raja, V.B.M., dan Rein, J.W. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan *Flypaper Effect* Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1): 13-26.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

- Halim, A., dan Muhammad, I. 2019. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, A., dan Muhammad, S.K. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Jakarta : Salemba Empat.
- Handayani, S., dan Saifudin. 2018. *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2016. *Majalah Ilmiah Solusi*, 17(4): 79-106.
- Haryanto., Sahrudin., dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati., dan Bambang, S. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(8): 1-21.
- <https://sulsel.bps.go.id/>
- Ishak., Rudi, A., dan Hasnah, M. 2019. *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (Dau) dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) terhadap Belanja Daerah di Kota Parepare. *Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2): 51-57.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. Deskripsi dan Analisis APBD TA 2011 DJPK.
- Kesuma, N.A., Kartika, R.S., Darul, A., dan Masnoni. 2022. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah dan Implikasinya terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi (EKSISTENSI)*, 11(1): 1439-1450.
- Kholmi, M. 2010. Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika Bisnis*, 2(2): 357-369.
- Kristina, S. R., Amran, T. N., dan Hanly, F. D. J. S. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal EMBA*, 9(1): 453-461.
- Kustianingsih, N., Muslimin., dan Abdul, K. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6): 82-91.
- Lampung antaranews. 2022. *Sri Mulyani sebut keuangan daerah masih sangat bergantung pada pusat*, (Online), (<https://lampung.antaranews.com/berita/609437/sri-mulyani-sebut-keuangan-daerah-masih-sangat-bergantung-pada-pusat>, diakses 21 September 2022).
- Machfud., Asnawi., dan Naz'aina. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan

terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-Mind)*, 5(1): 14-31.

- Mahmudi. 2021. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (Dau) dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Megariski, H. P. 2016. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2010-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2): 1-16.
- Megasari, I.A.G.S. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan *Flypaper Effect* pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20(2): 130-137.
- Nabilah, A. N., Aris, S., dan Hendra, K. 2016. Analisis *Flypaper Effect* PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2): 122-231.
- Nadhior, R. A. 2020. Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah (Studi Kasus Pada 34 Provinsi di Indonesia Periode 2017-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2): 1-38.
- Nindita, N. L., dan Sri, L. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Journal Accounting and Finance*, 2(1): 12-19.
- Nugraha, Y.N. 2019. *Ketergantungan Fiskal Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, (Online), (<https://accounting.binus.ac.id/2019/02/25/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/>), diakses 21 September 2022).
- Nurkhayati, E.D. 2022. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi*, 11(1): 1-13.
- Nursyam., dan Mersi, S. 2019. Pengaruh Pendapatan Keuangan Daerah Ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Maros. *Economy Deposit Journal*, 1(1): 33-40.
- Oktavia, D. 2014. *Flypaper Effect*: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur 2003-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2): 1-16.
- Puspitasari, A., dan Naila, R. S. 2017. Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi

- Empiris Pada Kabupaten Se-Karesidenan Pati Tahun 2010-2016). *Accounting Global Journal*, 1(1): 30-41.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan .
- \_\_\_\_\_. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Said, D., Ria, M., Rahmatia., Muhammad, Y.A., Abdul, H.B., Ratna, A.D., Grace, P., Ynasor, D., Hendragunawan, S.T., dan Sanusi, F. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Saleh, R. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 15(2): 111-134.
- Santoso, B. 2015. *Keagenan (Agency) Seri Hukum Bisnis*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Septriani., Armelly., Retno, A., Ekaputri., dan Esti, P. 2020. Analisis Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntabilitas*. 14(1): 33-56.
- Sintia, I. 2017. *Kemandirian Keuangan Daerah Berimplikasi dengan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014)*. Tesis. Bandung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia.
- Susanti, D.B., Sri, R., dan Siska, P.Y. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). *e-Proceeding of Management*, 3(3): 3308-3314.
- Suyanto. 2010. *Flypaper Effect Theory* dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1): 69-92.
- Syahrum., dan Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Tolosang, K.D. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3): 79-92.

- Wahyuni, E., dan Lilis, A. 2018. Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(6): 1-16.
- Wahyuningsih, Y.E. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wasil, M., Nika, S.P., Ayu, L., dan Nurliana, F. 2020. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2): 99-109.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Biodata

**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Nur Saidah Kamilah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 4 Juli 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat Rumah : Dusun Mangngai Kec. Tanralili Kab. Maros  
 Telepon Rumah dan HP : 085242211147  
 Alamat E-mail : [saidahnaba@gmail.com](mailto:saidahnaba@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

Pendidikan Formal : SDN 38 Biringkaloro, Mts Al-Irsyad Biringkaloro dan MAN 2 Kota Palu  
 Pendidikan Nonformal : Pelatihan *Basic Learning Skills, Character and Creativity* (BALANCE) Universitas Hasanuddin, Bina Kader Mahasiswa Akuntansi (BKMA) 2019

**Riwayat Prestasi**

Prestasi Akademik unit : *Awardee* Beasiswa YBM BRI *Smart Scholarship* Universitas Hasanuddin Periode Januari hingga Desember 2020  
 Prestasi Non Akademik : Peserta lomba menulis Nasional *Open Writing Competition* oleh FLP UINAM Tahun 2020, Juara 3 *Kyorugi Under 62 kg Senior Putri UNIBOS CUP 2022* Juara 3 *Kyorugi Under 67 kg Senior Putri Open Tournament UNHAS CUP 2022*

**Pengalaman**

Organisasi : Pengurus UKM Taekwondo Universitas Hasanuddin Periode 2020 dan 2021

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 6 Mei 2023



Nur Saidah Kamilah

## Lampiran 2. Peta Teori

## PETA TEORI

No.	Penulis/Topik/Judul Buku/Artikel	Konsep/Teori/Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/Isi Buku
1.	Saleh, R. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.	1. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian Keuangan. 2. Dana perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan.	<b>Variabel</b> : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah. <b>Teknik Analisis</b> : Regresi linier berganda.	1. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. 2. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. 3. Seluruh variabel independen (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) mempunyai kemampuan dalam memengaruhi kemandirian keuangan daerah secara bersama-sama.
2.	Andriani, R.N.R., dan Nisa, N.W. 2018.	1. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap	<b>Variabel</b> : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan	1. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan



	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015).	<p>kemandirian keuangan daerah.</p> <p>2. Dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.</p> <p>3. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.</p>	<p>dan kemandirian keuangan daerah.</p> <p><b>Teknik Analisis</b> : Analisis regresi berganda.</p>	<p>terhadap kemandirian keuangan daerah.</p> <p>2. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.</p> <p>3. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun ada beberapa faktor lain yang tidak diteliti penulis yang dapat memengaruhi kemandirian keuangan daerah.</p>
3.	Machfud., Asnawi., dan Naz'aina. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan	<p>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>2. Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif dan</p>	<b>Variabel</b> : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, tingkat kemiskinan dan tingkat kemandirian keuangan daerah.	<p>1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.</p> <p>2. Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan</p>

	Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.	signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 3. Dana Otonomi Khusus (OTSUS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 4. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	<b>Teknik Analisis</b> : Regresi data panel.	daerah. 3. Dana Otonomi Khusus (OTSUS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. 4. Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah.
4.	Fintari, S. 2020. Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> pada Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).	1. Ada pengaruh signifikan <i>flypaper effect</i> pada Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	<b>Variabel</b> : Dana alokasi umum dan kinerja keuangan pemerintah daerah. <b>Teknik Analisis</b> : Analisis regresi linier.	1. Terjadi <i>flypaper effect</i> pada dana alokasi umum di Pemerintahan Kota Bima. 2. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel <i>flypaper effect</i> pada DAU terhadap variabel kinerja keuangan.
5.	Kesuma, N.A., Kartika,	1. PAD berpengaruh positif	<b>Variabel</b> : pendapatan asli	1. Secara parsial PAD dan DAU

	<p>R.S., Darul, A., dan Masnoni. 2022.</p> <p><i>Analisis Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah dan Implikasinya terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.</p>	<p>terhadap belanja daerah.</p> <p>2. DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</p> <p>3. DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah.</p> <p>4. PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja daerah.</p> <p>5. PAD, DAU, DAK dan belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>	<p>daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p><b>Teknik Analisis</b> : Regresi linier berganda dan analisis statistik deskriptif.</p>	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>2. PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.</p> <p>3. PAD, DAU, DAK, dan belanja daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>4. Terjadi <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2019.</p>
--	--	--	---	---

Lampiran 3. Persentase Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Kabupaten/ Kota	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian (%)	Pola
2019	Selayar	Rp73.168.652	Rp784.863.362	9,32	Instruktif
2019	Bulukumba	Rp167.521.422	Rp1.023.703.426	16,36	Instruktif
2019	Bantaeng	Rp107.155.247	Rp777.067.004	13,79	Instruktif
2019	Jeneponto	Rp101.085.508	Rp1.024.516.004	9,87	Instruktif
2019	Takalar	Rp104.825.637	Rp850.383.600	12,32	Instruktif
2019	Gowa	Rp238.239.570	Rp1.258.904.850	18,92	Instruktif
2019	Sinjai	Rp102.318.763	Rp867.367.969	11,8	Instruktif
2019	Maros	Rp248.747.247	Rp979.207.170	25,4	Konsultatif
2019	Pangkep	Rp185.062.241	Rp1.011.383.048	18,3	Instruktif
2019	Barru	Rp103.887.441	Rp703.290.449	14,77	Instruktif
2019	Bone	Rp230.462.001	Rp1.603.392.651	14,37	Instruktif
2019	Soppeng	Rp138.447.177	Rp899.763.974	15,39	Instruktif
2019	Wajo	Rp142.164.594	Rp1.075.874.461	13,21	Instruktif
2019	Sidrap	Rp125.734.083	Rp938.071.388	13,4	Instruktif
2019	Pinrang	Rp133.363.939	Rp972.000.083	13,72	Instruktif
2019	Enrekang	Rp73.225.814	Rp780.914.439	9,38	Instruktif
2019	Luwu	Rp114.105.169	Rp1.043.484.277	10,94	Instruktif
2019	Tana Toraja	Rp119.464.171	Rp812.992.475	14,69	Instruktif
2019	Luwu Utara	Rp128.591.053	Rp923.587.941	13,92	Instruktif
2019	Luwu Timur	Rp313.544.283	Rp834.360.291	37,58	Konsultatif
2019	Toraja Utara	Rp51.882.968	Rp763.972.243	6,79	Instruktif
2019	Makassar	Rp1.303.316.324	Rp1.824.567.794	71,43	Partisipatif
2019	Pare-Pare	Rp137.892.125	Rp645.718.136	21,35	Instruktif
2019	Palopo	Rp165.664.350	Rp726.842.069	22,79	Instruktif
2020	Selayar	Rp66.371.402	Rp760.088.690	8,73	Instruktif
2020	Bulukumba	Rp169.475.966	Rp980.797.899	17,28	Instruktif
2020	Bantaeng	Rp110.141.022	Rp666.573.177	16,52	Instruktif
2020	Jeneponto	Rp109.189.131	Rp879.982.931	12,41	Instruktif
2020	Takalar	Rp126.864.460	Rp768.228.942	16,51	Instruktif
2020	Gowa	Rp241.469.601	Rp1.217.293.801	19,84	Instruktif
2020	Sinjai	Rp98.602.212	Rp820.634.785	12,02	Instruktif
2020	Maros	Rp219.100.517	Rp882.646.034	24,82	Instruktif
2020	Pangkep	Rp196.530.670	Rp961.344.950	20,44	Instruktif
2020	Barru	Rp101.324.047	Rp645.189.155	15,7	Instruktif
2020	Bone	Rp224.218.433	Rp1.445.278.185	15,51	Instruktif
2020	Soppeng	Rp151.860.141	Rp854.758.767	17,77	Instruktif
2020	Wajo	Rp143.732.705	Rp987.724.168	14,55	Instruktif

2020	Sidrap	Rp132.951.316	Rp824.743.456	16,12	Instruktif
2020	Pinrang	Rp131.176.927	Rp929.729.920	14,11	Instruktif
2020	Enrekang	Rp78.247.325	Rp721.882.308	10,84	Instruktif
2020	Luwu	Rp123.160.816	Rp941.735.488	13,08	Instruktif
2020	Tana Toraja	Rp110.936.063	Rp648.460.785	17,11	Instruktif
2020	Luwu Utara	Rp107.770.050	Rp856.480.145	12,58	Instruktif
2020	Luwu Timur	Rp369.383.649	Rp766.923.341	48,16	Konsultatif
2020	Toraja Utara	Rp55.672.227	Rp681.778.111	8,17	Instruktif
2020	Makassar	Rp1.078.328.560	Rp1.676.121.524	64,33	Partisipatif
2020	Pare-Pare	Rp161.232.038	Rp555.219.607	29,04	Konsultatif
2020	Palopo	Rp177.205.052	Rp665.583.966	26,62	Konsultatif
2021	Selayar	Rp87.072.440	Rp806.065.488	10,8	Instruktif
2021	Bulukumba	Rp214.268.055	Rp1.017.908.568	21,05	Instruktif
2021	Bantaeng	Rp183.179.635	Rp723.589.831	25,32	Konsultatif
2021	Jeneponto	Rp144.981.765	Rp918.339.707	15,79	Instruktif
2021	Takalar	Rp195.857.288	Rp800.263.498	24,47	Instruktif
2021	Gowa	Rp198.482.604	Rp1.265.457.732	15,68	Instruktif
2021	Sinjai	Rp99.292.703	Rp933.066.278	10,64	Instruktif
2021	Maros	Rp304.837.005	Rp985.485.153	30,93	Konsultatif
2021	Pangkep	Rp212.748.175	Rp962.307.767	22,11	Instruktif
2021	Barru	Rp106.629.369	Rp672.829.242	15,85	Instruktif
2021	Bone	Rp244.863.813	Rp1.524.644.685	16,06	Instruktif
2021	Soppeng	Rp127.827.067	Rp916.201.816	13,95	Instruktif
2021	Wajo	Rp145.526.853	Rp1.082.346.648	13,45	Instruktif
2021	Sidrap	Rp128.759.128	Rp896.963.904	14,35	Instruktif
2021	Pinrang	Rp136.394.123	Rp938.999.305	14,53	Instruktif
2021	Enrekang	Rp99.783.897	Rp780.875.729	12,78	Instruktif
2021	Luwu	Rp120.060.000	Rp982.525.814	12,22	Instruktif
2021	Tana Toraja	Rp124.308.829	Rp807.967.138	15,39	Instruktif
2021	Luwu Utara	Rp112.885.463	Rp910.857.633	12,39	Instruktif
2021	Luwu Timur	Rp314.224.809	Rp829.176.016	37,9	Konsultatif
2021	Toraja Utara	Rp89.650.900	Rp740.620.691	12,1	Instruktif
2021	Makassar	Rp1.686.388.513	Rp1.668.956.489	101,04	Delegatif
2021	Pare-Pare	Rp157.136.217	Rp583.232.262	26,94	Konsultatif
2021	Palopo	Rp167.917.529	Rp708.576.187	23,7	Instruktif

## Lampiran 4. Tabulasi Data Penelitian

TAHUN	X1	X2	Y	Z
2019	7,31	78,45	9,32	Rp19.641.730
2019	11,32	69,17	16,36	Rp32.101.219
2019	10,31	74,75	13,79	Rp34.090.750
2019	7,46	75,61	9,87	Rp47.058.006
2019	9,22	74,81	12,32	Rp31.768.866
2019	12,74	67,3	18,92	Rp50.600.413
2019	9,00	76,34	11,8	Rp25.891.589
2019	16,99	66,92	25,4	Rp48.104.544
2019	13,17	71,97	18,3	Rp31.721.602
2019	11,04	74,76	14,77	Rp20.983.480
2019	9,43	65,63	14,37	Rp46.404.456
2019	11,39	74,03	15,39	Rp24.565.980
2019	9,02	68,83	13,21	Rp39.752.900
2019	10,17	75,90	13,40	Rp39.062.784
2019	10,25	74,72	13,72	Rp54.730.002
2019	6,88	73,35	9,38	Rp30.673.574
2019	7,74	70,80	10,94	Rp38.464.210
2019	10,03	68,27	14,69	Rp40.887.730
2019	9,29	66,72	13,92	Rp30.206.903
2019	20,71	55,11	37,58	Rp12.323.336
2019	4,64	68,33	6,79	Rp34.741.394
2019	35,55	49,77	71,43	Rp79.593.879
2019	14,27	66,81	21,35	Rp20.230.788
2019	16,83	73,83	22,79	Rp21.555.115
2020	6,74	77,17	8,73	-Rp35.288.432
2020	12,59	72,85	17,28	-Rp71.976.236
2020	11,75	71,13	16,52	-Rp51.852.172
2020	8,69	70,06	12,41	-Rp60.709.572
2020	11,96	72,40	16,51	-Rp52.577.165
2020	12,82	64,62	19,84	-Rp79.276.651
2020	8,80	73,24	12,02	-Rp60.568.646
2020	15,86	63,89	24,82	-Rp79.097.332
2020	14,57	71,28	20,44	-Rp71.106.629
2020	11,08	70,52	15,70	-Rp40.483.293
2020	9,84	63,44	15,51	-Rp116.303.631
2020	12,63	71,08	17,77	-Rp60.700.534
2020	9,99	68,62	14,55	-Rp77.041.873
2020	11,20	69,50	16,12	-Rp63.576.258
2020	9,99	70,81	14,11	-Rp71.614.885
2020	7,11	65,56	10,84	-Rp59.915.673

2020	8,48	64,86	13,08	-Rp66.593.937
2020	9,79	57,25	17,11	-Rp47.879.514
2020	7,94	63,14	12,58	-Rp65.935.182
2020	24,69	51,28	48,16	-Rp49.476.639
2020	5,36	65,6	8,17	-Rp47.885.946
2020	32,44	50,43	64,33	-Rp129.500.809
2020	19,33	66,55	29,04	-Rp37.160.213
2020	18,28	68,66	26,62	-Rp40.713.736
2021	7,97	73,8	10,80	Rp13.546.841
2021	14,08	66,89	21,05	Rp16.424.185
2021	16,39	64,73	25,32	Rp6.508.205
2021	11,26	71,31	15,79	Rp10.733.529
2021	16,73	68,38	24,47	Rp8.968.363
2021	10,78	68,72	15,68	Rp13.484.852
2021	8,27	77,76	10,64	Rp8.638.657
2021	20,71	66,94	30,93	Rp71.620.224
2021	15,52	70,19	22,11	Rp10.925.066
2021	11,16	70,43	15,85	Rp7.134.737
2021	10,50	65,35	16,06	Rp0
2021	10,61	76,06	13,95	Rp9.859.140
2021	9,73	72,39	13,45	Rp13.213.908
2021	10,52	73,26	14,35	Rp8.599.777
2021	10,55	72,61	14,53	Rp10.145.180
2021	9,13	71,49	12,78	Rp7.754.861
2021	8,28	67,76	12,22	Rp16.559.243
2021	10,38	67,44	15,39	Rp10.294.078
2021	8,30	66,95	12,39	Rp17.210.388
2021	21,23	56,03	37,90	Rp10.559.043
2021	7,78	64,26	12,10	Rp8.794.301
2021	42,97	42,53	101,04	Rp49.636.117
2021	16,97	62,99	26,94	Rp6.282.409
2021	17,09	72,13	23,70	Rp6.845.563

## Lampiran 5. Data Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun  
Anggaran 2019 - 2021 (000 Rp)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1.	Selayar	1.000.448.358	984.926.367	1.092.257.960
2.	Bulukumba	1.479.907.458	1.346.374.716	1.521.740.010
3.	Bantaeng	1.039.548.863	937.063.236	1.117.819.183
4.	Jeneponto	1.354.963.070	1.256.069.109	1.287.846.490
5.	Takalar	1.136.744.598	1.061.149.580	1.170.400.500
6.	Gowa	1.870.608.907	1.883.817.390	1.841.411.193
7.	Sinjai	1.136.257.769	1.120.534.922	1.199.989.565
8.	Maros	1.463.260.372	1.381.411.565	1.472.187.141
9.	Pangkep	1.405.340.815	1.348.749.081	1.370.922.527
10.	Barru	940.725.038	914.860.359	955.353.309
11.	Bone	2.443.239.345	2.278.143.585	2.332.890.488
12.	Soppeng	1.215.328.621	1.202.470.519	1.204.604.425
13.	Wajo	1.575.433.188	1.439.325.666	1.495.069.089
14.	Sidrap	1.235.859.132	1.186.736.489	1.224.281.299
15.	Pinrang	1.300.927.793	1.312.939.659	1.293.122.547
16.	Enrekang	1.064.623.985	1.101.162.426	1.092.326.093
17.	Luwu	1.473.881.450	1.451.964.728	1.450.029.784
18.	Tana Toraja	1.190.812.432	1.132.684.863	1.198.000.001
19.	Luwu Utara	1.384.294.889	1.356.570.144	1.360.432.135
20.	Luwu Timur	1.513.976.802	1.495.670.375	1.479.775.992
21.	Toraja Utara	1.118.131.310	1.039.254.354	1.152.600.576
22.	Makassar	3.666.359.990	3.323.662.286	3.924.511.169
23.	Pare-Pare	966.446.929	834.229.378	925.792.750
24.	Palopo	984.390.254	969.408.935	982.408.360
JUMLAH		33.961.511.368	32.359.179.732	34.145.772.586

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun  
Anggaran 2019 - 2021 (000 Rp)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1.	Selayar	73.168.652	66.371.402	87.072.440
2.	Bulukumba	167.521.422	169.475.966	214.268.055
3.	Bantaeng	107.155.247	110.141.022	183.179.635
4.	Jeneponto	101.085.508	109.189.131	144.981.765
5.	Takalar	104.825.637	126.864.460	195.857.288
6.	Gowa	238.239.570	241.469.601	198.482.604
7.	Sinjai	102.318.763	98.602.212	99.292.703
8.	Maros	248.747.247	219.100.517	304.837.005
9.	Pangkep	185.062.241	196.530.670	212.748.175



10.	Barru	103.887.441	101.324.047	106.629.369
11.	Bone	230.462.001	224.218.433	244.863.813
12.	Soppeng	138.447.177	151.860.141	127.827.067
13.	Wajo	142.164.594	143.732.705	145.526.853
14.	Sidrap	125.734.083	132.951.316	128.759.128
15.	Pinrang	133.363.939	131.176.927	136.394.123
16.	Enrekang	73.225.814	78.247.325	99.783.897
17.	Luwu	114.105.169	123.160.816	120.060.000
18.	Tana Toraja	119.464.171	110.936.063	124.308.829
19.	Luwu Utara	128.591.053	107.770.050	112.885.463
20.	Luwu Timur	313.544.283	369.383.649	314.224.809
21.	Toraja Utara	51.882.968	55.672.227	89.650.900
22.	Makassar	1.303.316.324	1.078.328.560	1.686.388.513
23.	Pare-Pare	137.892.125	161.232.038	157.136.217
24.	Palopo	165.664.350	177.205.052	167.917.529
	JUMLAH	4.609.869.779	4.484.944.330	5.403.076.180

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun  
Anggaran 2019 - 2021 (000 Rp)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1.	Selayar	8.919.726	7.963.534	10.560.782
2.	Bulukumba	31.865.091	31.138.614	62.796.218
3.	Bantaeng	18.361.699	24.329.317	55.232.279
4.	Jeneponto	16.702.874	16.248.763	22.432.178
5.	Takalar	18.231.339	34.947.664	74.447.500
6.	Gowa	112.451.239	115.543.741	107.179.635
7.	Sinjai	16.419.188	14.336.813	15.832.785
8.	Maros	134.893.947	109.975.450	166.280.000
9.	Pangkep	74.881.677	80.514.014	95.932.829
10.	Barru	20.392.597	17.444.416	18.670.000
11.	Bone	54.776.703	54.738.945	53.902.080
12.	Soppeng	19.178.663	19.481.180	19.740.000
13.	Wajo	37.334.126	37.558.327	37.570.990
14.	Sidrap	33.619.376	38.266.173	35.963.880
15.	Pinrang	29.855.767	31.362.250	29.165.564
16.	Enrekang	10.523.207	12.592.295	14.659.000
17.	Luwu	25.548.757	23.594.550	25.350.000
18.	Tana Toraja	12.366.452	11.028.317	12.850.000
19.	Luwu Utara	23.264.800	21.960.971	38.083.101
20.	Luwu Timur	168.433.209	192.720.736	163.677.500
21.	Toraja Utara	19.572.426	19.004.505	36.585.549
22.	Makassar	1.067.323.034	864.313.239	1.298.039.000
23.	Pare-Pare	33.921.011	32.601.905	36.395.769

24.	Palopo	34.860.942	34.031.809	39.277.700
JUMLAH		2.023.697.850	1.845.697.528	2.470.624.339

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan  
Tahun Anggaran 2019 - 2021 (000 Rp)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1.	Selayar	1.918.189	1.735.588	2.568.372
2.	Bulukumba	11.241.748	30.887.106	43.821.837
3.	Bantaeng	6.031.180	4.441.952	37.795.000
4.	Jeneponto	50.169.799	60.673.174	84.968.743
5.	Takalar	2.098.727	3.040.103	17.139.000
6.	Gowa	79.360.833	66.507.429	37.760.817
7.	Sinjai	8.330.262	8.209.765	10.863.626
8.	Maros	21.821.619	15.239.083	71.512.000
9.	Pangkep	8.382.645	6.960.701	11.608.742
10.	Barru	8.811.903	5.537.189	8.451.218
11.	Bone	19.274.791	22.183.721	23.247.694
12.	Soppeng	6.646.739	6.264.366	5.726.236
13.	Wajo	14.527.674	9.761.435	27.365.732
14.	Sidrap	15.930.940	11.824.798	22.411.248
15.	Pinrang	4.379.679	3.952.292	3.474.736
16.	Enrekang	30.088.453	35.461.344	31.505.102
17.	Luwu	7.905.991	6.694.426	10.150.000
18.	Tana Toraja	12.803.712	7.163.530	15.000.001
19.	Luwu Utara	13.436.764	10.292.019	13.992.302
20.	Luwu Timur	4.187.130	4.505.935	5.747.309
21.	Toraja Utara	16.632.526	14.091.114	22.590.451
22.	Makassar	68.097.352	67.204.193	171.202.840
23.	Pare-Pare	7.491.169	5.869.616	8.810.595
24.	Palopo	9.074.168	8.880.154	10.760.902
JUMLAH		428.643.993	417.381.033	698.474.503

Realisasi Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan  
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun  
Anggaran 2019 - 2021 (000 Rp)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1.	Selayar	10.078.930	9.219.514	10.916.250
2.	Bulukumba	5.193.141	4.840.897	6.000.000
3.	Bantaeng	4.864.873	4.427.961	7.000.000
4.	Jeneponto	4.687.431	4.304.377	5.500.000
5.	Takalar	8.963.788	8.152.525	9.963.788
6.	Gowa	4.966.989	4.342.159	5.020.000
7.	Sinjai	4.773.195	4.335.458	4.773.195

8.	Maros	13.257.063	11.911.501	11.911.501
9.	Pangkep	12.391.379	11.432.942	11.059.500
10.	Barru	9.434.010	8.942.136	8.942.136
11.	Bone	8.558.628	10.647.162	12.983.631
12.	Soppeng	16.688.437	18.396.001	18.396.002
13.	Wajo	16.150.196	15.250.880	16.796.300
14.	Sidrap	4.711.090	4.276.625	5.000.000
15.	Pinrang	9.579.676	8.343.823	8.343.823
16.	Enrekang	16.741.120	15.412.302	18.741.120
17.	Luwu	5.462.262	5.220.162	5.200.000
18.	Tana Toraja	7.443.700	8.599.873	9.500.000
19.	Luwu Utara	5.170.778	4.544.886	4.652.928
20.	Luwu Timur	26.214.126	23.835.212	33.800.000
21.	Toraja Utara	4.832.342	5.161.183	5.000.000
22.	Makassar	18.225.557	31.875.689	88.098.282
23.	Pare-Pare	6.935.032	8.670.545	9.000.000
24.	Palopo	7.496.932	6.801.973	7.000.000
JUMLAH		232.820.675	238.945.786	323.598.456

Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 - 2021 (000 Rp)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1.	Selayar	52.251.807	47.452.766	63.027.036
2.	Bulukumba	119.221.442	102.609.349	101.650.000
3.	Bantaeng	77.897.495	76.941.792	83.152.356
4.	Jeneponto	29.525.404	27.962.817	32.080.844
5.	Takalar	75.531.783	80.724.168	94.307.000
6.	Gowa	41.460.509	55.076.272	48.522.152
7.	Sinjai	72.796.118	71.720.176	67.823.097
8.	Maros	78.774.618	81.974.483	55.133.504
9.	Pangkep	89.406.540	97.623.013	94.147.104
10.	Barru	65.248.931	69.400.306	70.566.015
11.	Bone	147.851.879	136.648.605	154.730.408
12.	Soppeng	95.933.338	107.718.594	83.964.829
13.	Wajo	74.152.598	81.162.063	63.793.831
14.	Sidrap	71.472.677	78.583.720	65.384.000
15.	Pinrang	89.548.817	87.518.562	95.410.000
16.	Enrekang	15.873.034	14.781.384	34.878.675
17.	Luwu	75.188.159	87.651.678	79.360.000
18.	Tana Toraja	86.850.307	84.144.343	86.958.828
19.	Luwu Utara	86.718.711	70.972.174	56.157.132
20.	Luwu Timur	114.709.818	148.321.766	111.000.000
21.	Toraja Utara	10.845.674	17.415.425	25.474.900

22.	Makassar	149.670.381	114.935.439	129.048.391
23.	Pare-Pare	89.544.913	114.089.972	102.929.853
24.	Palopo	114.232.308	127.491.116	110.878.927
JUMLAH		1.924.707.261	1.982.919.983	1.910.378.882

Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan  
Tahun Anggaran 2019 - 2021 (000 Rp)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1.	Selayar	784.863.362	760.088.690	806.065.488
2.	Bulukumba	1.023.703.426	980.797.899	1.017.908.568
3.	Bantaeng	777.067.004	666.573.177	723.589.831
4.	Jeneponto	1.024.516.004	879.982.931	918.339.707
5.	Takalar	850.383.600	768.228.942	800.263.498
6.	Gowa	1.258.904.850	1.217.293.801	1.265.457.732
7.	Sinjai	867.367.969	820.634.785	933.066.278
8.	Maros	979.207.170	882.646.034	985.485.153
9.	Pangkep	1.011.383.048	961.344.950	962.307.767
10.	Barru	703.290.449	645.189.155	672.829.242
11.	Bone	1.603.392.651	1.445.278.185	1.524.644.685
12.	Soppeng	899.763.974	854.758.767	916.201.816
13.	Wajo	1.075.874.461	987.724.168	1.082.346.648
14.	Sidrap	938.071.388	824.743.456	896.963.904
15.	Pinrang	972.000.083	929.729.920	938.999.305
16.	Enrekang	780.914.439	721.882.308	780.875.729
17.	Luwu	1.043.484.277	941.735.488	982.525.814
18.	Tana Toraja	812.992.475	648.460.785	807.967.138
19.	Luwu Utara	923.587.941	856.480.145	910.857.633
20.	Luwu Timur	834.360.291	766.923.341	829.176.016
21.	Toraja Utara	763.972.243	681.778.111	740.620.691
22.	Makassar	1.824.567.794	1.676.121.524	1.668.956.489
23.	Pare-Pare	645.718.136	555.219.607	583.232.262
24.	Palopo	726.842.069	665.583.966	708.576.187
JUMLAH		23.126.229.104	21.139.200.135	22.457.257.581

Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan  
Tahun Anggaran 2019 - 2021 (000 Rp)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1.	Selayar	7.373.783	10.562.848	8.613.504
2.	Bulukumba	9.086.969	13.755.879	12.507.375
3.	Bantaeng	8.072.936	10.059.645	8.465.910
4.	Jeneponto	9.980.018	13.248.096	10.507.355
5.	Takalar	10.457.801	15.776.636	10.035.460

6.	Gowa	10.977.571	16.454.208	12.852.078
7.	Sinjai	8.719.166	12.260.558	10.523.649
8.	Maros	16.903.926	16.600.487	21.120.228
9.	Pangkep	17.909.485	20.242.051	14.262.371
10.	Barru	8.053.984	10.599.798	8.940.789
11.	Bone	10.595.497	19.503.960	44.117.129
12.	Soppeng	12.029.647	15.227.233	13.008.013
13.	Wajo	20.353.560	29.966.894	26.948.776
14.	Sidrap	10.110.551	11.126.704	9.917.873
15.	Pinrang	8.860.543	12.465.481	9.736.976
16.	Enrekang	8.338.348	9.726.053	9.160.859
17.	Luwu	7.592.464	12.341.107	9.721.193
18.	Tana Toraja	7.437.558	11.426.557	9.127.463
19.	Luwu Utara	9.005.771	11.732.094	9.846.157
20.	Luwu Timur	29.310.737	29.385.874	21.439.415
21.	Toraja Utara	6.915.623	10.116.629	8.595.134
22.	Makassar	73.049.789	113.943.185	95.263.092
23.	Pare-Pare	9.280.478	13.097.187	11.528.111
24.	Palopo	8.223.532	13.444.909	10.589.145
JUMLAH		328.639.737	453.064.073	406.828.055

Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam  
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 - 2021 (000 Rp)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1.	Selayar	4.623.926	5.043.217	4.995.830
2.	Bulukumba	4.612.648	4.182.529	4.993.469
3.	Bantaeng	4.619.565	4.870.848	4.993.469
4.	Jeneponto	4.880.717	4.866.153	4.994.615
5.	Takalar	4.850.458	4.382.971	4.996.118
6.	Gowa	4.693.095	4.961.940	5.017.425
7.	Sinjai	5.482.021	4.023.799	4.996.247
8.	Maros	4.898.905	4.562.141	7.323.030
9.	Pangkep	5.743.788	4.405.099	5.085.192
10.	Barru	5.963.043	4.108.253	4.999.548
11.	Bone	6.584.018	3.963.128	5.545.737
12.	Soppeng	5.509.324	4.114.645	4.978.468
13.	Wajo	37.767.431	10.573.164	22.010.720
14.	Sidrap	5.039.266	4.842.542	4.993.469
15.	Pinrang	4.696.553	4.871.276	4.993.469
16.	Enrekang	5.009.248	4.847.757	4.998.973
17.	Luwu	6.238.798	3.776.062	5.420.123
18.	Tana Toraja	5.602.585	4.125.943	4.998.756
19.	Luwu Utara	5.107.859	6.851.065	5.943.613

20.	Luwu Timur	86.865.010	75.731.850	73.535.583
21.	Toraja Utara	5.473.108	3.890.210	4.998.225
22.	Makassar	4.623.235	4.842.508	5.016.966
23.	Pare-Pare	4.612.772	4.665.574	4.993.469
24.	Palopo	4.886.275	4.934.485	4.993.469
JUMLAH		238.383.648	187.437.159	209.815.983

Realisasi Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 - 2021 (000 Rp)

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
1.	Selayar	580.780.803	600.422.533	565.134.101	578.680.942
2.	Bulukumba	705.099.263	737.200.482	665.224.246	681.648.431
3.	Bantaeng	494.749.832	528.840.582	476.988.410	483.496.615
4.	Jeneponto	627.644.516	674.702.522	613.992.950	624.726.479
5.	Takalar	595.466.518	627.235.384	574.658.219	583.626.582
6.	Gowa	837.326.483	887.926.896	808.650.245	822.135.097
7.	Sinjai	585.911.082	611.802.671	551.234.025	559.872.682
8.	Maros	697.947.111	746.051.655	666.954.323	738.574.547
9.	Pangkep	752.773.975	784.495.577	713.388.948	724.314.014
10.	Barru	510.978.699	531.962.179	491.478.886	498.613.623
11.	Bone	1.070.426.493	1.116.830.949	1.000.527.318	1.000.527.318
12.	Soppeng	624.626.898	649.192.878	588.492.344	598.351.484
13.	Wajo	714.224.148	753.977.048	676.935.175	690.149.083
14.	Sidrap	610.506.232	649.569.016	585.992.758	594.592.535
15.	Pinrang	690.060.262	744.790.264	673.175.379	683.320.559
16.	Enrekang	534.335.959	565.009.533	505.093.860	512.848.721
17.	Luwu	680.212.384	718.676.594	652.082.657	668.641.900
18.	Tana Toraja	551.496.571	592.384.301	544.504.787	554.798.865
19.	Luwu Utara	655.693.773	685.900.676	619.965.494	637.175.882
20.	Luwu Timur	545.609.968	557.933.304	508.456.665	519.015.708
21.	Toraja Utara	519.040.535	553.781.929	505.895.983	514.690.284
22.	Makassar	1.299.554.321	1.379.148.200	1.249.647.391	1.299.283.508
23.	Pare-Pare	454.752.410	474.983.198	437.822.985	444.105.394
24.	Palopo	516.167.587	537.722.702	497.008.966	503.854.529
JUMLAH		15.855.385.823	16.710.541.073	15.173.306.115	15.517.044.782

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 - 2021 (000 Rp)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1.	Selayar	172.443.120	179.348.524	213.775.212
2.	Bulukumba	272.803.327	297.635.245	318.759.293
3.	Bantaeng	235.533.921	174.654.274	226.633.837

4.	Jeneponto	334.952.747	247.875.732	278.111.258
5.	Takalar	207.839.957	173.411.116	201.605.338
6.	Gowa	355.307.288	387.227.408	425.453.132
7.	Sinjai	241.364.111	253.116.403	357.673.700
8.	Maros	211.352.684	194.529.083	218.467.348
9.	Pangkep	203.234.198	223.308.852	218.646.190
10.	Barru	157.311.243	139.002.218	160.275.282
11.	Bone	469.382.187	421.283.779	474.454.501
12.	Soppeng	233.032.125	246.924.545	299.863.851
13.	Wajo	263.776.422	270.248.935	343.238.069
14.	Sidrap	273.352.555	222.781.452	287.460.027
15.	Pinrang	213.652.723	239.217.784	240.948.301
16.	Enrekang	202.557.310	202.214.638	253.867.176
17.	Luwu	310.976.421	273.535.662	298.742.598
18.	Tana Toraja	207.568.031	88.403.498	239.042.054
19.	Luwu Utara	223.573.635	217.931.492	257.891.981
20.	Luwu Timur	160.251.240	153.348.952	215.185.310
21.	Toraja Utara	197.801.583	161.875.289	212.337.048
22.	Makassar	367.746.570	307.688.440	269.392.923
23.	Pare-Pare	156.841.688	99.633.861	122.605.288
24.	Palopo	176.009.560	150.195.606	189.139.044
	JUMLAH	5.848.664.646	5.325.392.788	6.323.568.761